

KELEMBAGAAN TATANIAGA KEDELAI DI KABUPATEN GROBOGAN

Efriyani Sumastuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang
Email : efrisumastuti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to map soybean value chain which is directed at institutional development that is synergistic by paying attention to ABGC partnerships (Academic, Business, Government and Community). Determination of the sample is done by purposive sampling quota for respondents targeting input suppliers, soybean farmers, traders (middlemen and traders from village to provincial level), and retailers. For respondents stakeholders (academics, government, business people, and Gapoktan) were selected by proportional purposive sampling. Descriptive analysis has been used to analyze data in this study. The results showed that the local soybean trading system (from the aspect of distribution and consumption) in the research area through five stages from the first producer farmers to small and medium traders. Then from the two traders it was sold to wholesalers and processing industries. The products processed are distributed to consumers directly or through traders / retailers. Imported soybean trading flow through importers to distributors, then distributed to wholesalers and then distributed to retailers, processing industries and end consumers.

Keywords : institutions, trading systems, soybeans

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan tataniaga (*value chain*) kedelai yang diarahkan pada pengembangan kelembagaan yang sinergis dengan memperhatikan kemitraan ABGC (*Academic, Business, Government dan Community*). Penentuan sampel dilakukan dengan *quota purposive sampling* untuk responden target *supplier* input, petani kedelai, pedagang (tengkulak maupun pedagang dari tingkat desa hingga propinsi), dan pedagang pengecer. Untuk responden *stakeholders* (akademisi, pemerintah, pebisnis, dan Gapoktan) dipilih secara *proportional purposive sampling*. Analisis deskriptif telah digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alur tataniaga kedelai lokal (dari aspek distribusi dan konsumsi) di daerah penelitian melalui lima tahapan dari petani sebagai penghasil pertama ke pedagang pengumpul kecil dan sedang. Kemudian dari dua pedagang tersebut dijual ke pedagang besar dan industri pengolahan. Produk hasil pengolahan didistribusikan kepada konsumen secara langsung maupun melalui pedagang/ pengecer. Alur tataniaga kedelai impor melalui importir ke distributor, kemudian didistribusikan kepada pedagang besar dan selanjutnya disalurkan ke pengecer, industri pengolahan dan konsumen akhir.

Kata kunci : kelembagaan, tataniaga, kedelai

Pendahuluan

Kebutuhan kedelai meningkat setiap tahun sejalan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kesadaran masyarakat akan gizi dari protein nabati, serta pertumbuhan industri olahan kedelai. Indonesia dengan iklim tropis memiliki sejumlah daerah yang potensial untuk swasembada kedelai diantaranya Grobogan, Jawa Tengah. Indonesia masih mengandalkan kedelai impor mayoritas dari Amerika Serikat (89%), Malaysia (6%), dan Amerika Selatan (5%), dimana saat ini sedang terjadi kegagalan panen akibat iklim/cuaca buruk. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian Litbang Departemen Pertanian bahwa komoditas kedelai sangat rentan dengan perubahan iklim. Kenaikan satu satuan bulan basah/lembab mengakibatkan penurunan produksi kedelai sebesar 0,030 satuan. Selain itu,

perubahan jumlah bulan basah juga berpengaruh terhadap penurunan luas tanam sebesar 0,094 dan luas panen sebesar 0,109 satuan.

Kesulitan berkembangnya produksi kedelai di Indonesia diantaranya disebabkan oleh (1) lahan tanam kedelai yang minim, (2) keengganan petani menanam kedelai karena sulit ditanam di lahan jenuh air (tanaman subtropis), serta (3) kurang bersaingnya produksi kedelai dibanding jagung dikarenakan jagung lebih mudah ditanam, menguntungkan serta waktu penanaman yang sama sehingga terjadi *trade off* jagung-kedelai pada lahan.

Problem komoditas kedelai tidak sekedar produksi, produktivitas, ketersediaan lahan, tataniaga, pemasaran dan sejenisnya namun secara lebih realistis perlu lebih dalam menyentuh pula pola perilaku industri besar importir kedelai, industri besar olahan pangan maupun pakan ternak dari bahan kedelai, pola perilaku petani, dan peran kelembagaan (pemerintah, BUMN, litbang, koperasi), agar saling memikirkan solusi terbaik dan solusi jangka panjang guna mewujudkan swasembada kedelai. Tujuan penelitian adalah (1) untuk menganalisis kelembagaan tataniaga kedelai lokal maupun kedelai impor yang terjadi selama ini (2) Untuk merumuskan model kelembagaan terpadu dalam rangka *upgrading of value chain management* komoditas kedelai berdasar skenario terbaik

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi penghasil utama kedelai selain Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung dipilih menjadi daerah Pilot Project. Jawa Tengah sendiri memiliki 12.967 unit usaha tahu tempe (tertinggi di Indonesia tahun 2009 menurut Dewan Kedelai Nasional). Dua kabupaten didalamnya adalah Grobogan dan Wonogiri merupakan sentra kedelai yang potensial. Potensi kedelai lokal Grobogan sudah teruji di beberapa daerah dengan produktivitas 2,8-3,4 ton/ha. Bahkan dalam uji coba terbatas pernah mencapai 4 ton/ha yang melebihi rata-rata produktivitas nasional (1,3 ton/ha). Tingginya produktivitas tersebut tidak hanya karena benih Grobogan tetapi juga input teknologi seperti pengolahan tanah yang tepat (Widjaja, 2012). Beberapa produsen olahan pangan kedelai berpendapat bahwa penggunaan kedelai lokal ternyata hasilnya lebih baik dan cepat dalam proses peragian dan harganya lebih murah walaupun kedelai impor memiliki warna putih bersih dan ukuran yang seragam lebih besar. Hal ini seharusnya dapat menarik minat petani untuk semakin mengembangkan kedelai lokal karena diharapkan jaminan pasar akan terjadi dan tidak kalah dengan kedelai impor. Berdasarkan uraian di atas maka menerapkan kebijakan tataniaga kedelai dan peningkatan produksi kedelai lokal dipandang perlu untuk dilakukan.

Pendekatan tataniaga menjadikan mekanisme pasar sebagai pengatur utama kehidupan ekonomi, namun memberikan ruang pada penguatan daya saing kolektif melalui kerjasama bisnis diantara kelompok pelaku rantai yang termarjinalkan (Sulandjari, 2011). *Upgrading value chain management* berorientasi pada keadilan pasar yang ditandai oleh redistribusi nilai tambah kepada kelompok pelaku rantai yang termarjinalkan, sehingga berdampak padapengentasan kemiskinan. Proses penguatan daya saing kolektif dianyara kelompok marjinal dapat difasilitasi oleh lembaga-lembaga pendukung seperti pemerintah, *Business Development Service* dan perguruan tinggi.

Tataniaga merupakan lintasan sistem manajemen komoditas. Melalui deskripsi tataniaga yang mendalam, maka sistem manajemen komoditas dapat didefinisikan dan dimonitor sehingga dapat diarahkan pada penegakan nilai-nilai keadilan pasar (Springer-Heinze, 2008). Pengembangan sistem manajemen komoditas merupakan model intervensi pasar persaingan tidak sempurna yang melibatkan pemangku kepentingan. Diasumsikan bahwa mekanisme pasar merupakan bagian dari sistem sosial, dan sistem manajemen komoditas merupakan human activity system, maka proses pengembangan tataniaga komoditas kedelai dapat didekati dengan *Value Chain Analysis Methodology (VCA)*. Menurut Hellin dan Meijer (2006), *VCA* menetapkan prinsip-prinsip tentang bagaimana memetakan potensi pasar dan rantai nilai dari satu aktor ke pelaku lainnya. Penentuan sampel dilakukan dengan *quota purposive sampling* untuk responden target *supplier* input,

petani kedelai, pedagang (tengkulak maupun pedagang dari tingkat desa hingga propinsi), dan pedagang pengecer. Sedangkan untuk responden stakeholders (akademisi, pemerintah, pebisnis, dan Gapoktan) dipilih secara *proportional purposive sampling*.

Metode Penelitian

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *quota purposive sampling* untuk responden target yaitu *supplier* input, petani kedelai, pedagang (tengkulak maupun pedagang dari tingkat desa hingga propinsi), dan pedagang pengecer. Untuk responden stakeholders (akademisi, pemerintah, pebisnis, dan Gapoktan) dipilih secara *proportional purposive sampling*. Analisis Deskriptif dilakukan untuk menjelaskan model kelembagaan tata niaga kedelai di daerah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pada umumnya fungsi-fungsi tataniaga yang dilakukan oleh lembaga meliputi Fungsi pertukaran, Fungsi fisik dan Fungsi fasilitas. Fungsi dari setiap lembaga yang terlibat dalam tataniaga kedelai mulai dari produsen/ petani sampai konsumen akhir berbeda-beda, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Fungsi tataniaga Lembaga Tataniaga Kedelai

Lembaga Tataniaga	Fungsi tataniaga	Aktivitas
Petani	Pertukaran Fisik	Penjualan Transportasi
Pedagang pengumpul	Pertukaran Fisik Fasilitas	Pembelian dan penjualan Pengumpulan dan transportasi Resiko, pembiayaan, informasi pasar
Pedagang Kecamatan Pedagang Kabupaten Pedagang Provinsi	Pertukaran Fisik Fasilitas	Pembelian dan penjualan Pengumpulan, penyimpanan dan transportasi Pembiayaan, informasi pasar
Pedagang Pengecer	Pertukaran Fisik Fasilitas	Pembelian dan penjualan Pengumpulan, penyimpanan dan transportasi Pembiayaan, informasi pasar

Petani responden kedelai di Kabupaten Grobogan pada umumnya tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan kedelai karena pedagang pengumpul selalu ada untuk mengambil hasil produksi pada saat musim panen. Cara penjualan pada umumnya dilakukan secara langsung dari rumah atau lahan sawah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi petani, tetapi karena kurangnya informasi pasar dan harga, maka posisi tawar petani menjadi lemah. Dengan demikian harga yang diterima petani sangat tergantung dan ditentukan oleh pedagang pengumpul

Pedagang pengumpul kecil dikenal dengan sebutan *batiak*. Pedagang pengumpul kecil melakukan fungsi pembelian dan fungsi penjualan dalam tataniaga kedelai. Fungsi pembelian dilakukan pada saat pedagang pengumpul kecil melakukan pembelian biji kedelai ke petani. Kapasitas pembelian pedagang pengumpul kecil adalah 1 – 2 karung. Adapun fungsi penjualan dilakukan pada saat pedagang pengumpul kecil melakukan penjualan ke pedagang pengumpul sedang atau pedagang besar. Biji kedelai hasil pembelian tersebut biasanya langsung dijual pada hari yang sama dengan hari pembelian. Hal ini dilakukan karena pedagang pengumpul kecil menghadapi kendala keterbatasan modal. Semakin cepat ia menjual biji kedelai semakin cepat pula ia mendapatkan modal untuk membeli biji kedelai dari petani lainnya. Pedagang pengumpul sedang (kapasitas pembelian 10 – 15 karung)

membeli biji kedelai langsung ke petani atau lewat pedagang pengumpul kecil. Pedagang pengumpul sedang melaksanakan fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Pedagang pengumpul sedang selain melaksanakan kedua fungsi di atas juga ada yang melakukan fungsi tataniaga lain, yaitu pengeringan, sortasi, grading dan pengepakan. Biji kedelai hasil proses tersebut dijual ke pabrik pengolahan kedelai sedangkan biji kedelai tanpa perlakuan dijual langsung ke pedagang besar.

Pedagang besar melakukan fungsi pembelian dari pedagang pengumpul kecil dan sedang, Selanjutnya melakukan fungsi fasilitasi seperti pengeringan, sortasi, grading, pengemasan, transportasi dan pembiayaan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air biji kedelai sehingga umur simpannya bisa menjadi lebih panjang dan meningkatkan kualitas biji kedelai. Sortasi dilakukan untuk memisahkan biji kedelai yang pecah dan keriput. Grading dilakukan untuk mengklasifikasikan biji kedelai berdasarkan ukuran tertentu. Pengemasan dilakukan untuk melindungi biji kedelai dari kotoran, air dan memudahkan proses bongkar muat. Pembiayaan dilakukan dengan memberikan hutang kedelai kepada pembeli. Pembayaran kedelai yang dijual pedagang besar dilakukan dengan sistem mundur 2 – 4 minggu. Fungsi penjualan dilakukan saat menjual kedelai kepada kios/agen dan pengusaha pengolahan kedelai. Pedagang pengecer adalah lembaga tataniaga yang menerima pasokan kedelai dari pedagang besar untuk dijual langsung kepada konsumen akhir. Kapasitas kedelai yang dibeli ditentukan oleh skala usaha yang dimiliki pedagang pengecer. Pada umumnya pedagang pengecer menjual kedelai untuk keperluan konsumsi maupun benih, dengan pembayaran secara tunai. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam tataniaga kedelai dan kelembagaannya dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan pada wawancara dengan *key person* dan hasil FGD di Kabupaten Grobogan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan Tataniaga Kedelai dan Kelembagaannya

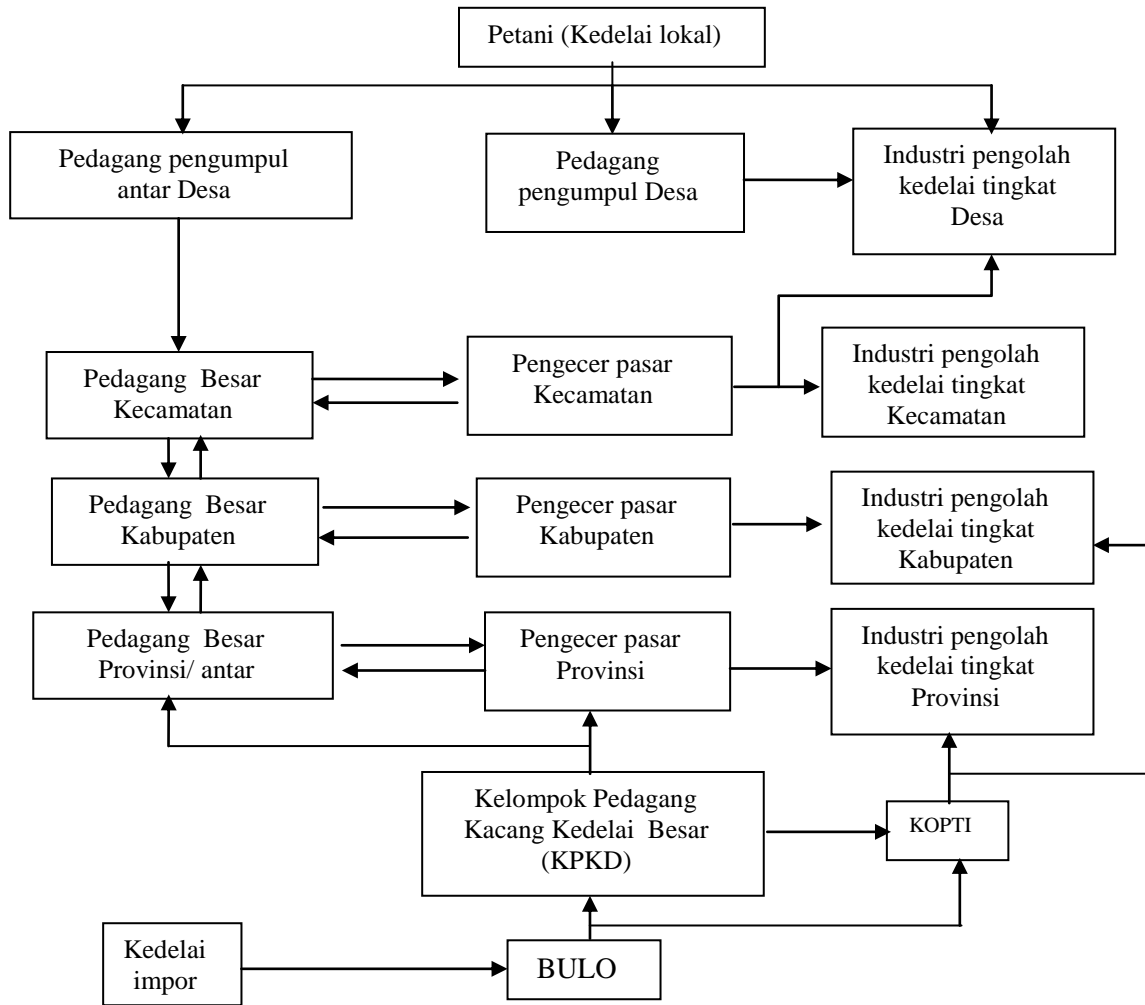
No	Aspek	Permasalahan	Penyebab	Solusi
1	Produksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas lahan yang ditanami kedelai semakin berkurang b. Pada umumnya petani enggan untuk menanam kedelai c. Provititas kedelai rendah d. Harga kedelai kurang menarik e. Kedelai hasil panen mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti industri dan perumahan b. Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien. c. Infrastruktur kurang memadai d. Kehilangan hasil pada pasca panen tinggi e. Kegagalan produksi karena faktor iklim f. Usaha tidak dalam skala ekonomi g. Tidak ada jaminan harga yang wajar dari pemerintah kecuali beras 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembatasan alih fungsi lahan b. Pemanfaatan hasil penelitian tentang teknologi produksi c. Penyediaan infrastruktur yang memadai d. Sosialisai/penyuluhan untuk proses pasca panen yang baik dan benar e. Kebijakan harga untuk petani
2	Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan tidak <i>sustainable</i> dan berfluktuasi, baik dalam kuantitas maupun kualitas b. Merupakan salah satu komoditas yang tidak tahan lama/ mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur dan sarana prasarana distribusi kurang memadai b. Sistem distribusi belum efisien c. Peran kelembagaan tataniaga belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai b. Memperbaiki sistem distribusi agar lebih efisien c. Menjamin ketersediaan yang <i>sustainable</i>, sehingga harga relatif

No	Aspek	Permasalahan	Penyebab	Solusi
		c. Harga berfluktuasi		stabil d. Kebijakan harga di pasar sehingga terjangkau konsumen
3	Konsumsi/ pengolahan	a. Ketersediaan bahan baku tidak <i>sustainable</i> dan berfluktuasi, baik dalam kuantitas maupun kualitas b. Harga berfluktuasi c. Ketidakmampuan penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai	a. Teknologi pengolahan, produk dan industri pangan belum berkembang secara optimal b. Budaya dan kebiasaan makan pada sebagian daerah dan etnis yang tidak mendukung pola konsumsi pangan dan gizi seimbang c. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pangan yang sehat dan aman.	a. Sosialisasi/penyuluhan tentang teknologi pengolahan, produk dan industri pangan tepat guna pada masyarakat maupun pelaku usaha yang berbahan baku kedelai b. Penyuluhan tentang pola konsumsi pangan dan gizi seimbang serta sehat dan aman

Sumber: wawancara dan FGD, 2018

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah diinventarisasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tataniaga kedelai dari aspek produksi, distribusi, konsumsi maupun kelembagaannya masih belum optimal. Untuk keperluan tersebut maka perlu disusun model revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan tataniaga kedelai. Dalam penelitian ini akan diuraikan 3 model kelembagaan tataniaga kedelai yang didasarkan pada hasil studi, yaitu : Skenario 1, Model kelembagaan tataniaga kedelai saat masih ditangani Bulog; Skenario 2, Model kelembagaan tataniaga kedelai saat ini (*existing*); Skenario 3, Model kelembagaan tataniaga kedelai yang diusulkan dalam studi ini. Analisis secara detail difokuskan pada skenario 3, tentang model kelembagaan tataniaga kedelai yang diusulkan oleh peneliti (*proposed model*). Tataniaga kedelai pada saat Bulog masih ikut berperan, meliputi tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Secara rinci, mekanisme tataniaga kedelai seperti pada Gambar 1. Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa peran pedagang besar provinsi/ antar provinsi, pedagang besar Kabupaten dan pedagang besar Kecamatan sangat penting. Sebab ketiga pedagang tersebut yang akan berpengaruh terhadap mekanisme distribusi tataniaga kedelai lokal. Pada saat panen raya, pedagang besar Kabupaten dan Kecamatan sangat aktif melakukan pembelian kedelai di Desa, bahkan kadang pembelian dilakukan langsung di lahan. Apabila tidak panen raya, pedagang besar membeli kedelai dari luar daerah. Kedelai yang diperoleh pedagang besar kemudian didistribusikan ke provinsi/ antar provinsi, pengecer masing-masing tingkat (desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi). Dari pengecer, kedelai langsung dijual kepada industri pengolah maupun konsumen.

Mekanisme tataniaga kedelai impor sedikit berbeda dibandingkan kedelai lokal. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan impor adalah BULOG. Pada masa ini BULOG mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai regulator dan sebagai eksekutor. Kedelai impor dari BULOG didistribusikan kepada pedagang besar kacang kedelai (KPKD) dan KOPTI. Dua lembaga ini (KPKD dan KOPTI) merupakan distributor kedelai impor BULOG. Peran distributor kedelai impor ini sangat penting, khususnya dalam menjamin suplai/ketersediaan kedelai kepada : Industri tahu tempe, Daerah-daerah yang industri tahu-tempenya tidak menjadi anggota KOPTI, Daerah yang permintaan kedelai lokal maupun impor tinggi, Konsumen.

Gambar 1. Model kelembagaan tataniaga kedelai (Skenario 1)

Sumber : Modifikasi dari berbagai sumber, 2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa peran pedagang besar provinsi/ antar provinsi, pedagang besar Kabupaten dan pedagang besar Kecamatan sangat penting. Sebab ketiga pedagang tersebut yang akan berpengaruh terhadap mekanisme distribusi tataniaga kedelai lokal. Pada saat panen raya, pedagang besar Kabupaten dan Kecamatan sangat aktif melakukan pembelian kedelai di Desa, bahkan kadang pembelian dilakukan langsung di lahan. Apabila tidak panen raya, pedagang besar membeli kedelai dari luar daerah. Kedelai yang diperoleh pedagang besar kemudian didistribusikan ke provinsi/ antar provinsi, pengecer masing-masing tingkat (desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi). Dari pengecer, kedelai langsung dijual kepada industri pengolah maupun konsumen.

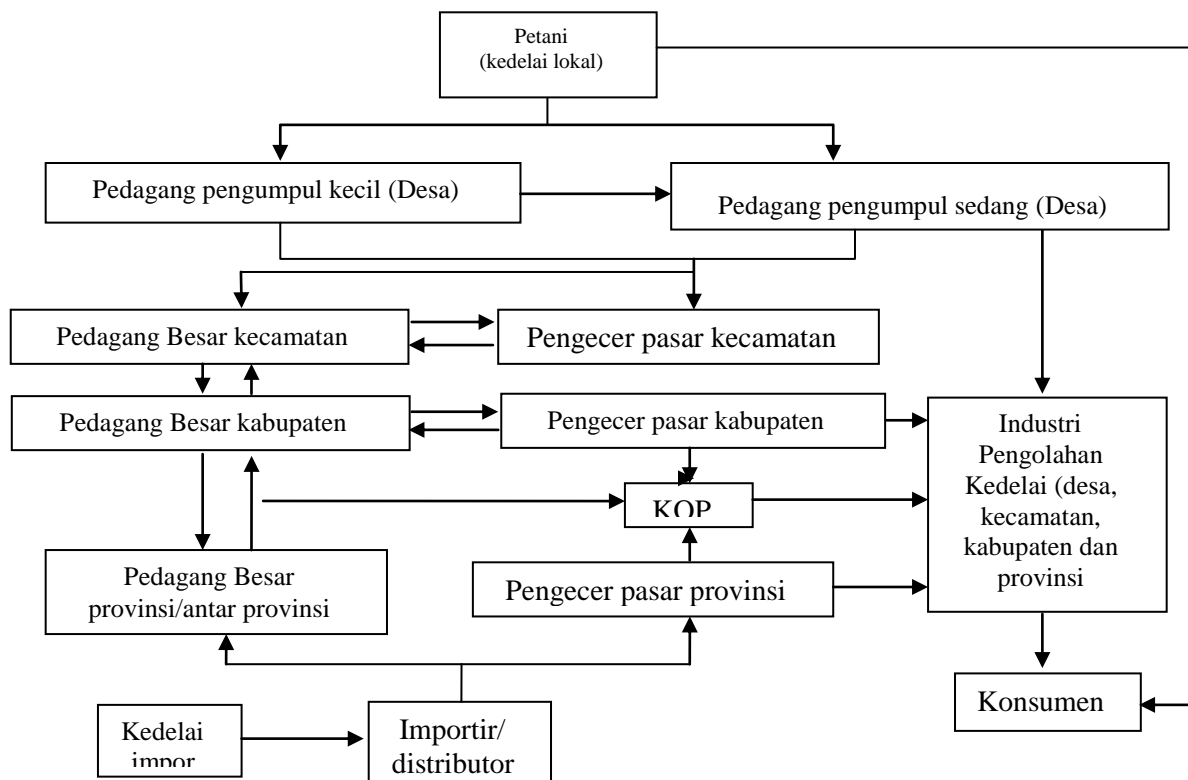
Mekanisme tataniaga kedelai impor sedikit berbeda dibandingkan kedelai lokal. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan impor adalah BULOG. Pada masa ini BULOG mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai regulator dan sebagai eksekutor. Kedelai impor dari BULOG didistribusikan kepada pedagang besar kacang kedelai (KPKD) dan KOPTI. Dua lembaga ini (KPKD dan KOPTI) merupakan distributor kedelai impor BULOG. Peran distributor kedelai impor ini sangat penting, khususnya dalam menjamin suplai/ketersediaan kedelai kepada : Industri tahu tempe, Daerah-daerah yang industri tahu-tempenya tidak menjadi anggota KOPTI, Daerah yang permintaan kedelai lokal maupun impor tinggi, Konsumen

Keberadaan distributor untuk kedelai impor tidak hanya menjamin dari sisi ketersediaannya saja, tetapi juga dari sisi harga. Dua lembaga ini bersama-sama dengan BULOG dapat mengatur stabilitas harga kedelai di tingkat konsumen. Tujuan stabilitas harga antara lain adalah untuk (1) Peningkatan daya beli konsumen/ industri pengolah kedelai, (2) Kestinambungan dan keberlanjutan usaha pengolah kedelai, Peningkatan produksi kedelai local (3) Proses penetapan harga kedelai di tingkat konsumen, khususnya untuk kedelai impor dengan mempertimbangkan harga jual kedelai lokal dan daya beli konsumen akhir maupun industri yang berbahan baku kedelai.

Menurut Amang (1996), di Indonesia pada tahun 1991 terdapat 73 unit KOPTI yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Selatan, Lampung dan DKI, dengan jumlah anggota 26 ribu pengrajin. Pada masa ini, KOPTI merupakan salah satu unit usaha dari PUSKUD yang menerima jatah kedelai impor dari BULOG. Jumlah kedelai impor yang diterima berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuannya dalam pengadaan kedelai lokal. Dengan demikian kedelai impor yang dialokasikan hanya untuk menutupi kekurangan kebutuhan kedelai secara keseluruhan dan tidak bermaksud untuk menggantikan.

Peran KOPTI dalam pengadaan dan distribusi kedelai sangat strategis, karena sebagai pemasok utama bahan baku, terutama kepada pengrajin tahu tempe yang menjadi anggota. Untuk operasional di lapang, KOPTI membentuk unit wilayah pelayanan pada sentra-sentra industri tahu tempe. Harga kedelai pada unit wilayah pelayanan dibuat sama dengan harga kedelai di KOPTI. Apabila terdapat perbedaan, pada umumnya karena ada tambahan biaya transportasi. Sistem pelayanan ini tentunya sangat menguntungkan bagi anggotanya. Model kelembagaan tataniaga yang ada saat ini (skenario 2) di Jawa Tengah (model eksisting), dibiarkan mengikuti mekanisme pasar bebas. Mekanisme ini mengakibatkan timbulnya monopoli dan harga menjadi berfluktuasi. Di samping itu juga berakibat pada keberlanjutan usaha yang berbahan baku kedelai serta besarnya konsumsi protein dari kedelai. Model eksisting tataniaga kedelai di Jawa Tengah seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Model kelembagaan tataniaga kedelai eksisting (Skenario 2)



Sumber : Data primer diolah, 2018

Dari Gambar 2 diketahui bahwa tataniaga kedelai lokal dimulai dari petani sebagai penghasil pertama, dibeli oleh pedagang pengumpul kecil dan sedang di tingkat desa. Pedagang pengumpul desa kemudian mendistribusikan kedelai ke pedagang besar kecamatan dan pengecer pasar kecamatan. Selanjutnya ke pedagang besar kabupaten, pengecer pasar kabupaten, KOPTI, yang dijual kepada pelaku industri pengolahan. Di industri pengolahan kedelai diolah menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi dan dipasarkan kepada konsumen akhir.

Berdasarkan Kepres No.45/ 1997, BULOG tidak lagi ikut berperan dalam tataniaga kedelai. Untuk menutup kekurangan permintaan kedelai dipenuhi dari kedelai impor. Impor kedelai dilakukan oleh tiga importir utama (sekitar 85%), yaitu PT Gebang Cahaya Utama, PT Cargil Indonesia dan PT Alam Agri. Dari tiga importir ini kedelai didistribusikan kepada pedagang besar provinsi. Masalah yang sering timbul adalah adanya kelangkaan kedelai. Hal tersebut terjadi karena terdapat kesenjangan yang besar antara permintaan dan jumlah produksi kedelai lokal. Kedelai lokal hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sekitar 25 %. Sebagai gambaran di Jawa Tengah, menurut data dari Dinperten TPH Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan kedelai jateng sekitar 700.000 ton/tahun. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi (sampai September tahun 2012) sebesar 136.000 ton. Melihat realitas yang ada di lapang, tidak dapat dipungkiri bahwa kita perlu impor kedelai. Masalah yang kemudian timbul adalah terjadinya fluktuasi harga dan kenaikan harga yang tidak wajar. Untuk menanggulangi kenaikan harga yang tidak wajar di lapang, maka pemerintah perlu mencari alternatif penyelesaian, antara lain dengan (1) Menetapkan kebijakan harga, (2) Meninjau kembali mekanisme tataniaga, terutama untuk kedelai impor, (3) Mengevaluasi efektivitas tataniaga kedelai, (4) Mengendalikan harga

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan model tataniaga kedelai skenario 1 dan skenario 2, yang masih terdapat kelemahan, maka diajukan model skenario 3 (usulan peneliti). Model skenario 3 disusun bertujuan untuk memperbaiki mekanisme yang sudah ada dalam rangka revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan tataniaga kedelai. Secara rinci model tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan tataniaga kedelai dilakukan dari tingkat pemerintah pusat sampai daerah terkecil (desa).

Gambar 3. Model Kelembagaan Tataniaga Kedelai yang Diusulkan Peneliti (Skenario 3)

Rancangan Bentuk Kelembagaan	Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa
Aksi Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> -Pengembalian peran BULOG sebagai <i>buffer stock</i> secara formal -Penetapan kuota impor -Peralihan dan pembagian fungsi dengan importir 	<ul style="list-style-type: none"> -Pendelegasian kewenangan dari pusat ke divisi regional -Penguatan kelembagaan -Pembagian fungsi dengan KOPTI 	<ul style="list-style-type: none"> -Pendelegasian kewenangan kepada Satgas Kabupaten/ Kota -Penguatan kelembagaan -Pembagian fungsi dengan KOPTI 	<ul style="list-style-type: none"> -Pendelegasian kewenangan kepada Satgas Kecamatan -Penguatan kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pendelegasian kewenangan kepada Satgas Desa -fungsionalisasi Satgas dan kelompok tani -Penetapan HPP
Transaction Cost	<ol style="list-style-type: none"> Biaya informasi : penyusunan database sentra produksi kedelai, kebutuhan kedelai, volume yang harus diimpor dan Negara pengekspor kedelai Biaya pembuatan keputusan : Peraturan Pemerintah Biaya operasional : Penunjang perencanaan provinsi, evaluasi kinerja kelembagaan dan peraturan pemerintah, keberlanjutan pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> Biaya informasi : potensi wilayah, produksi dan kebutuhan kedelai Biaya pembuatan keputusan : peraturan daerah tingkat I Biaya operasional : SOTK, operasional BULOG Divre, evaluasi kinerja kelembagaan dan peraturan daerah, keberlanjutan pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> Biaya informasi : potensi wilayah, produksi dan kebutuhan kedelai Biaya pembuatan keputusan : peraturan daerah tingkat II Biaya operasional : SOTK, pembentukan dan operasional Satgas, evaluasi kinerja kelembagaan dan peraturan daerah, keberlanjutan pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> Biaya informasi : potensi wilayah, produksi dan kebutuhan kedelai Biaya pembuatan keputusan : pembentukan satgas Biaya operasional : operasional Satgas, evaluasi kinerja kelembagaan dan peraturan daerah, keberlanjutan pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> Biaya informasi : potensi wilayah, teknologi tepat guna, harga pasar Biaya pembuatan keputusan : pembentukan satgas Biaya operasional : operasional Satgas, operasi pasar, evaluasi kinerja kelembagaan dan peraturan daerah, keberlanjutan pelaksanaan program
Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> Rencana pengembalian peran BULOG sebagai lembaga penyangga bahan pokok, khususnya kedelai Pembentukan peraturan pemerintah Penataan kelembagaan Evaluasi kinerja kelembagaan <i>Sustainability</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan peraturan daerah Penataan dan sinergi kelembagaan Daerah Tingkat I SOTK Mengaktifkan Tupoksi antar lembaga Evaluasi kinerja kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan peraturan daerah Penataan dan sinergi kelembagaan Daerah Tingkat II SOTK Pembentukan Satgas Mengaktifkan Tupoksi antar lembaga Evaluasi kinerja kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengaktifkan tupoksi antar lembaga Pembentukan Satgas Implementasi teknologi tepat guna Operasi pasar Maintenance infrastruktur dan fasilitas penunjang Monitoring dan supervisi Maintenance infrastruktur dan fasilitas penunjang 	
Pihak Terkait	Pemerintah : Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, BULOG Akademisi : Balitbang Swasta : industri, pelaku usaha Masyarakat : LSM, media massa	Pemerintah :Dinperatan TPH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BULOG Divre Akademisi : Balitbang, Universitas setempat, peneliti Swasta : industri, pelaku usaha, KOPTI Masyarakat : LSM, media massa	Pemerintah :Dinperatan TPH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Akademisi : Balitbang, Universitas setempat, peneliti Swasta : industri, pelaku usaha, KOPTI Masyarakat : LSM, media massa	Pemerintah (Kecamatan) Swasta : industri, pelaku usaha Masyarakat : LSM, media massa	Pemerintah (Desa) Swasta : industri, pelaku usaha Masyarakat : LSM, media massa, kelompok tani

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa alur tataniaga kedelai lokal (dari aspek distribusi dan konsumsi) di daerah penelitian melalui lima tahapan dari petani sebagai penghasil pertama ke pedagang pengumpul kecil dan sedang. Kemudian dari dua pedagang tersebut dijual ke pedagang besar dan industri pengolahan. Produk hasil pengolahan didistribusikan kepada konsumen secara langsung maupun melalui pedagang/ pengecer. Alur tataniaga kedelai impor melalui importir ke distributor, kemudian didistribusikan kepada pedagang besar dan selanjutnya disalurkan ke pengecer, industri pengolahan dan konsumen akhir.

Kelembagaan tataniaga kedelai dilihat dari aspek distribusi memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Model kelembagaan tataniaga kedelai dirumuskan dalam 3 skenario, yaitu model kelembagaan tataniaga kedelai saat masih ditangani Bulog (Skenario 1); model kelembagaan tataniaga kedelai eksisting (skenario 2) dan model kelembagaan tataniaga kedelai yang diusulkan peneliti (skenario 3). Dalam Model kelembagaan tataniaga skenario 3, dirinci berdasarkan pada wilayah kerja dan dibedakan menjadi 5 wilayah, yaitu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Dari aspek distribusi untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga kedelai, diperlukan Penetapan HPP kedelai, Kuota impor, Regulasi dan subsidi seperti yang dilakukan pada komoditas padi. Selain itu perlu komitmen bersama antara pemerintah sebagai fasilitator dengan masyarakat sebagai konsumen akhir dan stake holder (petani, pedagang/ pelaku usaha) mengenai mekanisme tataniaga yang efisien dan menguntungkan semua pihak.

Referensi

- Bhattarai, Ram Chandra. 2010. *Assesment of Transaction Costs in Farmer's Managed Irrigation System in Nepal*. Economic Journal of Development Issues Vol. 11&12 No.1-2.
- CGPRT Centre & CAPSA. 1984. *Sistem Komoditas Kedelai di Indonesia*. Laporan Penelitian Pusat Palawija Departemen Pertanian. Jakarta
- Dinpertan TPH Prov. Jateng. 2012. *Laporan Tahunan 2011*. Ungaran, Jawa Tengah.
- Fiona Y, Soetoro dan Zulfikar N. 2015. Analisis Pemasaran Kedelai (Suatu Kasus di Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH* Volume 1 Nomor 2, Januari 2015.
- Jahan KM, *at.al*. 1998. *Transaction Cost in Fisheries co-Management at Oxbow Lake (Baor) in Bangladesh*. University Puta, Malaysia.
- Hellin, Jon dan Meijer, Madelon. 2006. *Guidelines for Value Chain Analysis*. Download dari <http://www.ssrn.org> pada 3 Agustus 2012
- Hidayat, Nur Sofyan. 2012. *Negeri Tempe Krisis Kedelai*. Download dari <http://bisniskeuangan.kompas.com> pada 5 Agustus 2012.
- Peterson, Warren; G. Gijbers; dan M. Wilks. 2003. *An Organizational Performance Assessment System for Agricultural Research Organizations: Concepts, Methods, and Procerures*. Juni 2003. ISNAR, The Hague, Netherland.
- Puspitasari, Listya. 2008. *Sistem Agribisnis dan Analisis Kinerja Produksi (Glicine Soya L) di Kabupaten Grobogan*. Tesis, Magister Agribisnis, UNDIP
- Silva, de Harsha; Ratnadiwakara, Dimuthu; Soysa, Shamistra. 2010. *Transaction Costs in Agriculture: from the Planting Decision to Selling at the Wholesale Market*. *Research Report International Development Research Centre*. Ottawa. Canada
- Springer-Heize, Andreas. 2008. *Manual Value Link*. GTZ. Indonesia.

- Sumalde, Zenaida dan Pedroso Suzette. 2001. Transaction Cost of a Community Based Coastal Resource Management Program in San Miguel Bay, Philippines. *Research Report EEPSEA*. Singapore
- Sucihatningsih. 2012. Model Revitalisasi Kinerja Penyuluh Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan Transaction Cost. *Laporan Kemajuan Penelitian Strategis Nasional*. DP2M
- Sulandjari, Sri. 2011. *Perencanaan, Koordinasi dan Sinergitas Model/Sistem Penguatan Koperasi dan UKM*. Kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengan dan CEMSET FE UKSW.
- Syahyuti. 2003. *Pembangunan pertanian indonesia dalam pengaruh kapitalisme dunia: analisis ekonomi politik perberasan*. Pusat penelitian dan pembangunan sosial ekonomi pertanian.
- Widjaja, Adi. 2012. *Kedelai Lokal Tidak Dikembangkan*. Download dari <http://suarapembaruan.com> pada 2 Agustus 2012
- Zhang, Junlian. 2005. Transaction Cost in Water Markets in China's Heihe River Basin. *Research Report EEPSEA*. Singapore